

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di desa, kelurahan, dan kecamatan.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintah diperlukan perilaku pemerintah yang jujur, terbuka, bertanggung jawab dan demokrasi. Sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Pembangunan wilayah pedesaan/kelurahan tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat pedesaan dan kelurahan, sehingga seorang kepala kelurahan sebagai kepala pemerintahan harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa/kelurahan, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian desa/kelurahan. Namun dalam kenyataannya menunjukkan bahwa penilaian kinerja kepala desa/kelurahan

oleh aparatur pemerintah dan masyarakat, dalam mengembangkan desa/kelurahan masih tergolong serba lambat, lamban, dan berbelit-belit.

Kesemuanya ini diakibatkan oleh adanya seorang kepala kelurahan yang memimpin pemerintahan belum memiliki pengalaman, kurangnya motivasi, belum lagi ditambah sistem birokrasi pemerintahan yang begitu kompleks .

Seperti diketahui keberhasilan sebuah organisasi tergantung oleh beberapa faktor. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau tercapainya tujuan organisasi adalah kinerja para pemimpinnya. Mereka yang dapat mengkombinasikan kualitas kepemimpinan dengan kekuatan yang ada dalam posisinya untuk menciptakan pengaruh yang kuat kepada bawahannya dan koleganya dipandang sebagai pemimpin yang baik.

Kemampuan memimpin yaitu kemampuan seorang kepala desa/kelurahan dalam memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan bawahan. Seseorang yang mempunyai posisi sebagai pemimpin dalam suatu organisasi mengemban tugas untuk melaksanakan kepemimpinann. Dengan kata lain pemimpin adalah orangnya dan kepemimpinan atau *leadership* adalah kegiatannya. Menurut Wahyudi (2009: 120) kepemimpinan adalah sebagai kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mengarahkan, sekaligus mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota agar bersikap mandiri dalam bekerja terutama dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Terjadinya pemekaran wilayah di indonesia, khususnya di beberapa kabupaten, menyebabkan terjadinya perubahan sistem dan struktur pemerintahan

baik pusat maupun daerah. Untuk menghadapi perubahan tersebut pemerintah Kota Gorontalo berkewajiban meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahannya di berbagai bidang, antara lain peningkatan kemampuan SDM seperti keahlian, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan, pelatihan, kursus, magang dan lain-lain.

Masyarakat yang dinamis telah berkembang dalam berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Seiring dengan dinamika masyarakat dan perkembangannya, kebutuhan akan pelayanan yang semakin kompleks serta pelayanan yang semakin baik, cepat, dan tepat. Aparatur pemerintah yang berada ditengah-tengah masyarakat dinamis tersebut tidak dapat tinggal diam, tetapi harus mampu berkraesi dan aktif serta memiliki trobosan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal peningkata desa, kelurahan dan kecamatan yang dipimpinnya, sehingga tidak kala bersaing dengan desa dan kelurahan lainnya.

Tentunya untuk mencapai semuanya ini tidak terlepas dari kinerja profesional seorang kepala desa/kelurahan. Kinerja selalu merupakan tanda keberhasilan suatu organisasi dan orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut (Hikman,1990).Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para pimpinan atau manejer sering tidak memperhatikan kegagalan atau keberhasilan dari yang dilakukannya, serta tidak mengetahui betapa merosotnya atau buruknya kinerja sehingga organisasi/instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan-kesan buruk organisasi

yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda-tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang diformulasikan dengan judul “ ***KINERJA KEPEMIMPINAN LURAH DULALOWO TIMUR KECAMATAN KOTA TENGAH KOTA GORONTALO***”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Fasilitas/sarana prasarana pada kantor kelurahan dulalowa timur belum memadai.
2. Motivasi kerja staf kelurahan yang masih rendah.
3. Disiplin kerja para staf kelurahan masih rendah.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti mencoba merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Kepemimpinan Lurah Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?
2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan Kinerja Kepemimpinan Lurah Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja kepemimpinan Lurah Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja kepemimpinan Lurah Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan untuk menambah wawasan pendahuluan bagi para pembaca, mahasiswa dan yang penting bagi peneliti sendiri.
2. Sebagai bahan masukan dan rujukan bagi pemerintah kelurahan khususnya Lurah Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo dalam hal mengembangkan Kelurahan.
3. Sebagai sumbangsih untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.